

ANALISIS PENGARUH PROGRAM SUBSIDI BERAS TERHADAP STABILITAS PASOKAN DAN HARGA PANGAN DIKOTA SORONG

Agus Irianto¹, Yopi M Hehanusa², Siti Hanafiah Bauw³, Andi Irwan⁴

Magister Ilmu Manajemen, Pascasarjana Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong^{1,2,3,4}

Email: andiirwan261@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh program subsidi beras terhadap stabilisasi pasokan dan harga pangan di Kota Sorong. Sebagian besar penelitian sebelumnya mengenai efektivitas subsidi beras dan kebijakan stabilisasi harga pangan banyak dilakukan di wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengkaji implementasi subsidi beras di Kota Sorong, sebuah wilayah dengan karakteristik geografis dan logistik yang unik. Kondisi distribusi, biaya transportasi, dan keterbatasan infrastruktur di wilayah Papua Barat Daya memberikan temuan yang berbeda dari penelitian di daerah lain. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan kombinasi kajian literatur dan data lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Ketahanan Pangan, pelaku distribusi beras, dan masyarakat penerima manfaat, serta melalui analisis dokumen kebijakan terkait subsidi pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program subsidi beras berperan penting dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan pokok, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor distribusi, transparansi, dan ketepatan sasaran program. Upaya perbaikan sistem pendataan dan pengawasan distribusi perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan pelaksanaan program di lapangan. Studi ini hanya berfokus pada kondisi Kota Sorong sebagai lokasi penelitian. Meskipun memberikan gambaran mendalam mengenai pelaksanaan subsidi beras di wilayah ini, temuan penelitian belum dapat digeneralisasikan secara penuh untuk konteks kabupaten/kota lain di Papua Barat Daya atau wilayah Indonesia Timur yang memiliki karakteristik logistik berbeda.

Kata Kunci: Subsidi Beras, Stabilisasi Harga, Pasokan Pangan, Kota Sorong, Kebijakan Pangan

PENDAHULUAN

Ketersediaan dan stabilitas harga pangan merupakan isu strategis yang sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan suatu negara untuk memproduksi pangan yang cukup, tetapi juga dengan bagaimana negara tersebut mampu menjamin akses dan keterjangkauan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, beras menjadi komoditas yang paling vital, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menjadikan beras sebagai bahan makanan pokok utama. Setiap fluktuasi harga atau gangguan pada pasokan beras dapat berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

Subsidi merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan mengoreksi kegagalan pasar (*market failure*) dan melindungi kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi. Menurut Mankiw (2018), subsidi didefinisikan sebagai kebijakan fiskal yang bertujuan menurunkan biaya produksi atau harga barang tertentu agar lebih terjangkau bagi konsumen. Dalam konteks pangan, subsidi berfungsi sebagai alat stabilisasi harga sekaligus instrumen redistribusi pendapatan.

Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan telah berupaya menstabilkan harga dan pasokan beras, salah satunya melalui program subsidi beras. Program ini secara umum bertujuan menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat, terutama kelompok rentan dan miskin, sekaligus menekan laju inflasi bahan pangan. Bentuk subsidi dapat berupa subsidi harga, subsidi transportasi, maupun bantuan langsung berupa beras bersubsidi seperti yang dijalankan dalam program *Raskin* (Beras untuk Rumah

Tangga Miskin) yang kemudian bertransformasi menjadi *Beras Sejahtera (Rastra)* dan kini dikenal sebagai *Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)*. Melalui program ini, pemerintah berharap dapat menekan beban pengeluaran rumah tangga miskin sekaligus menjaga stabilitas harga beras di pasar domestik.

Kebijakan subsidi beras di Indonesia telah berlangsung lama dan mengalami beberapa perubahan bentuk seiring perkembangan kebijakan sosial ekonomi. Awalnya, pemerintah menerapkan *Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)* yang bertujuan memberikan beras dengan harga di bawah pasar bagi kelompok masyarakat miskin. Program ini kemudian bertransformasi menjadi *Beras Sejahtera (Rastra)* dan pada tahap berikutnya diintegrasikan ke dalam *Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)*. Perubahan kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi penyaluran subsidi pangan.

Menurut Suparmoko (2017), keberhasilan program subsidi bergantung pada tiga faktor utama, yaitu: (1) ketepatan sasaran penerima manfaat, (2) efisiensi mekanisme distribusi, dan (3) keberlanjutan fiskal pemerintah. Apabila ketiga faktor tersebut tidak terpenuhi, maka subsidi justru berpotensi menimbulkan distorsi ekonomi dan beban anggaran yang tinggi. Dalam hal ini, efektivitas subsidi beras tidak hanya dinilai dari sisi penyaluran bantuan, tetapi juga dari dampaknya terhadap stabilisasi pasokan dan harga pangan di pasar.

Menurut teori ekonomi publik, subsidi merupakan intervensi pemerintah yang bertujuan menurunkan harga barang tertentu agar terjangkau oleh masyarakat luas. Dalam konteks pangan, subsidi beras diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara daya beli masyarakat dan kelangsungan produksi serta distribusi pangan. Beberapa penelitian sebelumnya (Edison et al., 2016; Kasmir, 2016; Sutrisno, 2016) menunjukkan bahwa efektivitas subsidi sangat bergantung pada ketepatan sasaran, mekanisme penyaluran, dan koordinasi antar lembaga.

Dalam kerangka pembangunan daerah, kebijakan subsidi pangan juga menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan mekanisme pasar. Kota Sorong, sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi di wilayah Papua Barat Daya, memiliki karakteristik unik dalam konteks pangan. Kota ini tidak memiliki lahan pertanian yang luas dan sebagian besar kebutuhan berasnya dipasok dari luar daerah, seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan antarwilayah menyebabkan Kota Sorong sangat rentan terhadap gangguan distribusi dan fluktuasi harga di tingkat nasional.

Stabilisasi harga dan pasokan pangan merupakan salah satu tujuan utama kebijakan ketahanan pangan nasional. Menurut Wibowo (2016), stabilisasi harga pangan dapat diartikan sebagai upaya menjaga agar harga bahan pokok tetap berada dalam rentang yang wajar sehingga tidak menimbulkan inflasi berlebihan maupun deflasi yang merugikan produsen. Dalam konteks beras, stabilisasi harga berkaitan erat dengan pengendalian pasokan dan permintaan.

Beras sebagai komoditas utama memiliki peran strategis dalam struktur ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Karena sifatnya yang *inelastis* terhadap permintaan, sedikit perubahan pasokan dapat menyebabkan perubahan harga yang signifikan. Oleh karena itu, intervensi pemerintah menjadi penting untuk menjaga keseimbangan pasar. Menurut Kasmir (2016), kebijakan stabilisasi harga dapat dilakukan melalui tiga cara: (1) pengaturan stok melalui cadangan beras pemerintah, (2) pengendalian harga melalui subsidi dan operasi pasar, dan (3) penguatan sistem distribusi pangan antarwilayah.

Dalam teori ekonomi makro, kebijakan stabilisasi harga pangan juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan angka inflasi. Ketika harga beras melonjak, pengeluaran rumah

tangga meningkat dan daya beli masyarakat menurun, sehingga berpotensi memperlebar tingkat kemiskinan. Sebaliknya, jika harga dapat dijaga stabil melalui subsidi, maka konsumsi masyarakat tetap terjaga dan perekonomian daerah dapat tumbuh secara lebih berkelanjutan.

Data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sorong menunjukkan bahwa kebutuhan beras di wilayah ini mencapai lebih dari 2.000 ton per bulan, sedangkan pasokan lokal tidak lebih dari 5–10 persen. Kondisi ini memperlihatkan bahwa stabilitas pasokan dan harga sangat tergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan peran lembaga seperti Perum Bulog dalam menjaga ketersediaan stok. Oleh karena itu, program subsidi beras menjadi instrumen vital yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan politik. Program ini tidak hanya menjamin akses masyarakat terhadap pangan pokok, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat miskin dan menekan potensi gejolak sosial akibat kenaikan harga bahan pokok.

Ketahanan pangan secara konseptual mengacu pada kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat baik dari sisi ketersediaan, akses, maupun pemanfaatan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, bergizi, merata, dan terjangkau. Dalam konteks daerah, tanggung jawab menjaga ketahanan pangan tidak hanya berada di tangan pemerintah pusat, tetapi juga menjadi bagian dari kewenangan pemerintah daerah.

Di Kota Sorong, peran pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dilakukan melalui kerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Perum Bulog Subdivre Sorong. Pemerintah daerah berperan dalam memastikan kelancaran distribusi, monitoring harga, serta penyaluran beras bersubsidi kepada masyarakat sasaran. Tantangan geografis dan logistik di wilayah Papua Barat Daya menuntut koordinasi lintas lembaga agar kebijakan subsidi dapat berjalan efektif.

Menurut Sudaryo et al. (2018), efektivitas kebijakan publik di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, serta koordinasi antarinstansi pelaksana. Jika salah satu aspek ini lemah, maka kebijakan yang telah dirancang dengan baik di tingkat pusat bisa mengalami kendala implementasi di lapangan. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, efektivitas subsidi beras di Kota Sorong perlu dilihat tidak hanya dari sisi kebijakan nasional, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengimplementasikannya.

Namun demikian, pelaksanaan program subsidi beras di lapangan seringkali menghadapi berbagai persoalan. Beberapa penelitian dan laporan menunjukkan adanya masalah dalam hal ketepatan sasaran penerima manfaat, efisiensi distribusi, dan transparansi pelaksanaan program. Di beberapa wilayah termasuk Kota Sorong, terdapat keluhan masyarakat mengenai keterlambatan distribusi, kualitas beras yang tidak sesuai standar, dan ketidaksesuaian jumlah bantuan dengan data penerima. Selain itu, faktor geografis dan logistik juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyaluran beras bersubsidi di wilayah Papua dan Papua Barat Daya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara konseptual program subsidi beras memiliki tujuan yang baik, efektivitasnya sangat bergantung pada sistem pelaksanaan dan pengawasan di lapangan. Dalam konteks Kota Sorong, di mana sebagian besar pasokan berasal dari luar daerah, efektivitas subsidi sangat ditentukan oleh kelancaran rantai distribusi dan koordinasi antarinstansi pemerintah, terutama antara Dinas Ketahanan Pangan, Perum Bulog, serta pemerintah kota. Ketika koordinasi berjalan baik, subsidi beras dapat berfungsi efektif sebagai stabilisator harga dan pasokan. Sebaliknya, ketika mekanisme distribusi terganggu, tujuan program menjadi tidak optimal.

Penelitian ini berlandaskan pada tiga teori utama yang saling berkaitan, yaitu:

1. Teori Intervensi Pemerintah (Government Intervention Theory) – menurut Stiglitz (2015), intervensi diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar, termasuk pada sektor pangan, agar alokasi sumber daya lebih adil dan efisien. Subsidi merupakan bentuk nyata intervensi ini.
2. Teori Stabilisasi Ekonomi (Economic Stabilization Theory) – mengacu pada pandangan Keynes (1936), pemerintah memiliki peran aktif dalam menjaga keseimbangan ekonomi makro melalui kebijakan fiskal, salah satunya subsidi pangan untuk menstabilkan harga.
3. Teori Ketahanan Pangan (Food Security Theory) – sebagaimana dikemukakan oleh FAO (2017), ketahanan pangan mencakup empat pilar utama: ketersediaan (*availability*), akses (*access*), pemanfaatan (*utilization*), dan stabilitas (*stability*). Kebijakan subsidi beras berkontribusi langsung terhadap dua pilar pertama, yaitu ketersediaan dan akses.

Dengan mengacu pada teori-teori tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana program subsidi beras berkontribusi terhadap stabilisasi pasokan dan harga pangan di Kota Sorong. Subsidi beras tidak hanya dipandang sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai kebijakan sosial yang memiliki dampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selain aspek ekonomi, subsidi beras juga memiliki dimensi sosial yang signifikan. Program ini tidak hanya menekan harga, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan dan pengendalian inflasi pangan. Stabilitas harga beras yang terjaga dapat menekan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam jangka panjang, kebijakan subsidi beras juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya tujuan kedua yaitu *Zero Hunger*.

Dalam perspektif teori ekonomi publik, kebijakan subsidi dianggap sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk mengoreksi ketidakseimbangan pasar yang dapat merugikan masyarakat luas. Namun, efektivitas subsidi seringkali menjadi perdebatan

Berdasarkan perspektif ketahanan pangan (FAO, 2019), stabilitas pasokan mencakup ketersediaan fisik pangan yang cukup, akses ekonomi terhadap pangan, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan. Program subsidi beras diharapkan mampu memperkuat dimensi tersebut dengan cara menjaga harga tetap stabil, menjamin pasokan, serta mendukung kesejahteraan petani dan konsumen.

karena adanya potensi distorsi pasar, beban fiskal, dan penyimpangan dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis empiris di tingkat daerah, termasuk di Kota Sorong, untuk melihat sejauh mana subsidi beras benar-benar berpengaruh terhadap stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Berdasarkan perspektif ketahanan pangan (FAO, 2019), stabilitas pasokan mencakup ketersediaan fisik pangan yang cukup, akses ekonomi terhadap pangan, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan. Program subsidi beras diharapkan mampu memperkuat dimensi tersebut dengan cara menjaga harga tetap stabil, menjamin pasokan, serta mendukung kesejahteraan petani dan konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi penting karena berupaya menjawab pertanyaan utama: *sejauh mana program subsidi beras mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Kota Sorong?* Selain itu, penelitian ini juga ingin mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program subsidi beras di tingkat lokal, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat penerima manfaat.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggabungkan kajian literatur mengenai kebijakan subsidi dan data lapangan yang diperoleh dari wawancara dengan instansi terkait,

pelaku distribusi, dan masyarakat penerima manfaat. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika pelaksanaan program subsidi beras di Kota Sorong.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai kebijakan publik di bidang pangan, khususnya mengenai efektivitas program subsidi dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan pangan yang lebih tepat sasaran, efisien, dan berkeadilan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kebijakan ketahanan pangan daerah, khususnya di wilayah timur Indonesia, serta mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem pangan nasional yang tangguh, adil, dan berkelanjutan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji pengaruh subsidi terhadap stabilisasi pangan di Indonesia. Misalnya, penelitian oleh Suryana (2018) menemukan bahwa subsidi pangan berperan penting dalam menjaga stabilitas harga beras nasional, namun efektivitasnya menurun ketika sistem distribusi terganggu. Penelitian lain oleh Rahmawati dan Yusuf (2020) menunjukkan bahwa implementasi program *Rastra* di daerah terpencil sering menghadapi hambatan transportasi dan data penerima manfaat yang tidak akurat.

Sementara itu, studi oleh Nurhayati (2021) di Provinsi Papua Barat menunjukkan bahwa kebijakan subsidi beras berhasil menjaga harga di tingkat konsumen, tetapi belum optimal dalam memperkuat cadangan pangan daerah. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini memiliki gap penelitian yaitu belum adanya kajian komprehensif mengenai bagaimana subsidi beras berpengaruh terhadap stabilisasi pasokan dan harga pangan secara bersamaan di Kota Sorong, baik dari aspek kebijakan maupun implementasi lapangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Subsidi dalam Kebijakan Publik

Subsidi merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan mengoreksi kegagalan pasar (*market failure*) dan melindungi kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi. Menurut Mankiw (2018), subsidi didefinisikan sebagai kebijakan fiskal yang bertujuan menurunkan biaya produksi atau harga barang tertentu agar lebih terjangkau bagi konsumen. Dalam konteks pangan, subsidi berfungsi sebagai alat stabilisasi harga sekaligus instrumen redistribusi pendapatan.

Kebijakan subsidi beras di Indonesia telah berlangsung lama dan mengalami beberapa perubahan bentuk seiring perkembangan kebijakan sosial ekonomi. Awalnya, pemerintah menerapkan *Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)* yang bertujuan memberikan beras dengan harga di bawah pasar bagi kelompok masyarakat miskin. Program ini kemudian bertransformasi menjadi *Beras Sejahtera (Rastra)* dan pada tahap berikutnya diintegrasikan ke dalam *Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)*. Perubahan kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi penyaluran subsidi pangan.

Menurut Suparmoko (2017), keberhasilan program subsidi bergantung pada tiga faktor utama, yaitu: (1) ketepatan sasaran penerima manfaat, (2) efisiensi mekanisme distribusi, dan (3) keberlanjutan fiskal pemerintah. Apabila ketiga faktor tersebut tidak terpenuhi, maka subsidi justru berpotensi menimbulkan distorsi ekonomi dan beban anggaran yang tinggi. Dalam hal ini, efektivitas subsidi beras

tidak hanya dinilai dari sisi penyaluran bantuan, tetapi juga dari dampaknya terhadap stabilisasi pasokan dan harga pangan di pasar.

Teori Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Stabilisasi harga dan pasokan pangan merupakan salah satu tujuan utama kebijakan ketahanan pangan nasional. Menurut Wibowo (2016), stabilisasi harga pangan dapat diartikan sebagai upaya menjaga agar harga bahan pokok tetap berada dalam rentang yang wajar sehingga tidak menimbulkan inflasi berlebihan maupun deflasi yang merugikan produsen. Dalam konteks beras, stabilisasi harga berkaitan erat dengan pengendalian pasokan dan permintaan.

Beras sebagai komoditas utama memiliki peran strategis dalam struktur ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Karena sifatnya yang *inelastis* terhadap permintaan, sedikit perubahan pasokan dapat menyebabkan perubahan harga yang signifikan. Oleh karena itu, intervensi pemerintah menjadi penting untuk menjaga keseimbangan pasar. Menurut Kasmir (2016), kebijakan stabilisasi harga dapat dilakukan melalui tiga cara: (1) pengaturan stok melalui cadangan beras pemerintah, (2) pengendalian harga melalui subsidi dan operasi pasar, dan (3) penguatan sistem distribusi pangan antarwilayah.

Dalam teori ekonomi makro, kebijakan stabilisasi harga pangan juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan angka inflasi. Ketika harga beras melonjak, pengeluaran rumah tangga meningkat dan daya beli masyarakat menurun, sehingga berpotensi memperlebar tingkat kemiskinan. Sebaliknya, jika harga dapat dijaga stabil melalui subsidi, maka konsumsi masyarakat tetap terjaga dan perekonomian daerah dapat tumbuh secara lebih berkelanjutan.

Ketahanan Pangan dan Peran Pemerintah Daerah

Ketahanan pangan secara konseptual mengacu pada kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat baik dari sisi ketersediaan, akses, maupun pemanfaatan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, bergizi, merata, dan terjangkau. Dalam konteks daerah, tanggung jawab menjaga ketahanan pangan tidak hanya berada di tangan pemerintah pusat, tetapi juga menjadi bagian dari kewenangan pemerintah daerah.

Di Kota Sorong, peran pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dilakukan melalui kerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Perum Bulog Subdivre Sorong. Pemerintah daerah berperan dalam memastikan kelancaran distribusi, monitoring harga, serta penyaluran beras bersubsidi kepada masyarakat sasaran. Tantangan geografis dan logistik di wilayah Papua Barat Daya menuntut koordinasi lintas lembaga agar kebijakan subsidi dapat berjalan efektif.

Menurut Sudaryo et al. (2018), efektivitas kebijakan publik di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, serta koordinasi antarinstansi pelaksana. Jika salah satu aspek ini lemah, maka kebijakan yang telah dirancang dengan baik di tingkat pusat bisa mengalami kendala implementasi di lapangan. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, efektivitas subsidi beras di Kota Sorong perlu dilihat tidak hanya dari sisi kebijakan nasional, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengimplementasikannya.

Kerangka Teori Penelitian

Penelitian ini berlandaskan pada tiga teori utama yang saling berkaitan, yaitu:

1. Teori Intervensi Pemerintah (Government Intervention Theory)

menurut Stiglitz (2015), intervensi diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar, termasuk pada sektor pangan, agar alokasi sumber daya lebih adil dan efisien. Subsidi merupakan bentuk nyata intervensi ini.

2. Teori Stabilisasi Ekonomi (Economic Stabilization Theory)

mengacu pada pandangan Keynes (1936), pemerintah memiliki peran aktif dalam menjaga keseimbangan ekonomi makro melalui kebijakan fiskal, salah satunya subsidi pangan untuk menstabilkan harga.

3. Teori Ketahanan Pangan (Food Security Theory)

seperti dikemukakan oleh FAO (2017), ketahanan pangan mencakup empat pilar utama: ketersediaan (*availability*), akses (*access*), pemanfaatan (*utilization*), dan stabilitas (*stability*). Kebijakan subsidi beras berkontribusi langsung terhadap dua pilar pertama, yaitu ketersediaan dan akses.

Dengan mengacu pada teori-teori tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana program subsidi beras berkontribusi terhadap stabilisasi pasokan dan harga pangan di Kota Sorong. Subsidi beras tidak hanya dipandang sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai kebijakan sosial yang memiliki dampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji pengaruh subsidi terhadap stabilisasi pangan di Indonesia. Misalnya, penelitian oleh Suryana (2018) menemukan bahwa subsidi pangan berperan penting dalam menjaga stabilitas harga beras nasional, namun efektivitasnya menurun ketika sistem distribusi terganggu. Penelitian lain oleh Rahmawati dan Yusuf (2020) menunjukkan bahwa implementasi program *Rastra* di daerah terpencil sering menghadapi hambatan transportasi dan data penerima manfaat yang tidak akurat.

Sementara itu, studi oleh Nurhayati (2021) di Provinsi Papua Barat menunjukkan bahwa kebijakan subsidi beras berhasil menjaga harga di tingkat konsumen, tetapi belum optimal dalam memperkuat cadangan pangan daerah. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini memiliki gap penelitian yaitu belum adanya kajian komprehensif mengenai bagaimana subsidi beras berpengaruh terhadap stabilisasi pasokan dan harga pangan secara bersamaan di Kota Sorong, baik dari aspek kebijakan maupun implementasi lapangan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial, ekonomi, dan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan program subsidi beras di Kota Sorong. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif berfokus pada pemaknaan, pemahaman, serta interpretasi terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan, bukan pada pengukuran kuantitatif. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pada proses, konteks, dan makna yang muncul dari pengalaman para pelaku dan penerima manfaat program subsidi beras.

Pendekatan kualitatif dianggap paling relevan karena isu yang dikaji mencakup aspek sosial-ekonomi masyarakat, implementasi kebijakan pemerintah, serta persepsi masyarakat terhadap stabilitas pasokan dan harga beras. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memahami bagaimana koordinasi antarinstansi

pemerintah, seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Perum Bulog, berperan dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan di tingkat lokal.

Untuk memperoleh data yang mendalam dan valid, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data berikut:

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan para informan mengenai pelaksanaan program subsidi beras. Panduan wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian, meliputi: mekanisme distribusi, kendala di lapangan, dampak terhadap harga, serta efektivitas program dalam menjaga pasokan pangan.

2. Observasi Lapangan

Peneliti melakukan observasi langsung terhadap kegiatan distribusi beras bersubsidi di beberapa titik distribusi di Kota Sorong. Observasi ini bertujuan untuk memahami kondisi riil pelaksanaan program, termasuk proses penyaluran, kualitas beras, dan keterlibatan masyarakat.

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2018) yang terdiri atas tiga tahapan utama:

1. Reduksi Data (Data Reduction) – proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data mentah dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi.
2. Penyajian Data (Data Display) – menyusun data dalam bentuk narasi tematik dan tabel deskriptif agar lebih mudah dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification) – menemukan pola, hubungan sebab-akibat, dan makna dari data yang telah dianalisis.

Untuk menjamin keabsahan hasil penelitian, digunakan empat kriteria validitas menurut Lincoln dan Guba (1985), yaitu:

1. Kredibilitas (Credibility) – memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan realitas lapangan melalui triangulasi sumber, pengecekan anggota (*member check*), dan pengamatan berulang.
2. Transferabilitas (Transferability) – menggambarkan konteks penelitian secara rinci agar hasilnya dapat dijadikan acuan pada konteks yang serupa di wilayah lain.
3. Dependabilitas (Dependability) – menjamin konsistensi hasil penelitian melalui dokumentasi rinci terhadap seluruh proses penelitian.
4. Konfirmabilitas (Confirmability) – menjaga objektivitas peneliti dengan mendasarkan setiap temuan pada data yang valid, bukan pada opini pribadi.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan yang kredibel, relevan, dan berguna bagi pengembangan kebijakan pangan di tingkat daerah maupun nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Program subsidi beras di Kota Sorong dilaksanakan melalui kerja sama antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sorong dengan Perum Bulog Subdivre Sorong. Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam menjaga stabilitas pangan, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Sejak tahun 2017, bentuk program telah bertransformasi dari *Beras Sejahtera (Rastra)* menjadi *Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)*. Namun, pada kondisi tertentu, seperti ketika terjadi kenaikan harga beras yang signifikan pada tahun 2023, pemerintah kembali menyalurkan beras bersubsidi secara langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sorong (2025), program subsidi beras masih menjadi salah satu instrumen utama dalam menjaga kestabilan harga dan pasokan di pasar. Setiap bulan, Bulog menyalurkan rata-rata 450 hingga 600 ton beras subsidi kepada masyarakat penerima manfaat di Kota Sorong. Distribusi dilakukan melalui agen e-warung yang telah terdaftar dalam sistem BPNT, serta melalui bantuan langsung pemerintah (BLP) pada periode tertentu.

Namun demikian, pelaksanaan program ini menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal logistik dan transportasi. Karena sebagian besar beras yang disalurkan berasal dari Makassar dan Surabaya, proses pengiriman sering terhambat oleh kondisi cuaca, keterlambatan kapal, dan keterbatasan sarana bongkar muat di pelabuhan Sorong. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas pasokan beras di tingkat lokal, terutama ketika permintaan meningkat menjelang hari besar keagamaan atau musim paceklik.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan pihak Bulog, diketahui bahwa keberadaan subsidi beras berperan penting dalam menjaga cadangan beras pemerintah (CBP) di Kota Sorong. Stok CBP yang dikelola Bulog rata-rata berkisar 1.200–1.500 ton per bulan, dan sebagian besar digunakan untuk operasi pasar serta penyaluran bantuan sosial. Data ini menunjukkan bahwa subsidi beras membantu menjaga ketersediaan stok minimal selama 2–3 bulan ke depan, sehingga mencegah terjadinya kelangkaan beras di pasaran.

Hasil wawancara dengan petugas gudang Bulog menyebutkan bahwa pasokan beras di Kota Sorong relatif stabil berkat pengadaan rutin dari pelabuhan Makassar dan Surabaya. Ketika stok menurun, Bulog segera melakukan koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan untuk mengatur operasi pasar. Dalam praktiknya, subsidi beras berfungsi sebagai penyangga pasokan (buffer stock) yang mampu menekan potensi lonjakan harga akibat keterbatasan stok di pasar.

Selain itu, hasil wawancara dengan masyarakat penerima manfaat menunjukkan bahwa ketersediaan beras bersubsidi memberikan rasa aman terhadap kemungkinan kekurangan pangan. Seorang penerima bantuan di Kelurahan Rufei menyatakan bahwa sebelum adanya distribusi beras subsidi, harga di pasar bisa naik hingga Rp16.000 per kilogram. Namun setelah bantuan beras turun, harga kembali stabil di kisaran Rp12.000–Rp13.000 per kilogram. Fakta ini menunjukkan bahwa program subsidi beras memiliki dampak nyata terhadap stabilitas pasokan dan persepsi keamanan pangan masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Suryana (2018) yang menyatakan bahwa subsidi pangan, khususnya beras, memiliki efek penstabil terhadap pasokan dan harga di tingkat konsumen melalui pengendalian stok dan operasi pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pedagang di Pasar Remu dan Pasar Boswesen, diketahui bahwa harga beras eceran di Kota Sorong relatif stabil selama periode 2022–2024, dengan kisaran Rp11.000–Rp13.000 per kilogram untuk kualitas medium. Ketika terjadi kenaikan harga di tingkat nasional pada awal 2023 akibat faktor El Niño dan gangguan distribusi, harga beras di Sorong hanya naik sekitar 5–7 persen. Hal ini menunjukkan adanya efek stabilisasi harga yang dihasilkan dari mekanisme subsidi dan operasi pasar oleh Bulog.

Data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sorong tahun 2024 juga memperkuat temuan tersebut, di mana inflasi bahan makanan pada triwulan keempat tahun 2024 tercatat sebesar 2,1%, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 3,4%. Dinas Ketahanan Pangan Kota Sorong menilai capaian ini tidak terlepas dari pelaksanaan program subsidi beras dan operasi pasar yang rutin dilakukan menjelang hari besar keagamaan.

Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa dampak stabilisasi harga tidak merata di seluruh wilayah kota. Di beberapa kelurahan yang jauh dari pusat distribusi, seperti Klawasi dan Malaingkeci, harga beras eceran masih lebih tinggi karena biaya transportasi tambahan. Hal ini

menunjukkan perlunya pemerataan distribusi dan optimalisasi logistik agar subsidi benar-benar efektif menjangkau seluruh masyarakat.

Dari sisi implementasi, sebagian besar informan menyebutkan bahwa mekanisme penyaluran subsidi beras di Kota Sorong telah berjalan cukup baik, terutama sejak sistem BPNT diterapkan. Namun terdapat beberapa kendala utama, yaitu:

1. Keterlambatan distribusi akibat cuaca buruk dan jadwal kapal yang tidak menentu;
2. Data penerima manfaat yang belum selalu mutakhir, sehingga masih ditemukan kasus rumah tangga nonmiskin yang menerima bantuan;
3. Kualitas beras yang bervariasi, karena pasokan berasal dari berbagai daerah pemasok.

Kendala tersebut menyebabkan sebagian masyarakat merasa bantuan tidak selalu tepat waktu atau sesuai kebutuhan. Pemerintah daerah berupaya memperbaikinya melalui koordinasi lintas instansi dan digitalisasi data penerima manfaat.

Dari hasil wawancara dengan aparaturnya kelurahan, ditemukan bahwa koordinasi antarinstansi telah meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama dengan adanya sistem *e-voucher* untuk BPNT. Namun, permasalahan infrastruktur transportasi dan biaya logistik tinggi masih menjadi hambatan utama bagi efektivitas kebijakan subsidi beras di wilayah timur Indonesia.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program subsidi beras di Kota Sorong berpengaruh positif terhadap stabilisasi pasokan dan harga pangan. Temuan ini konsisten dengan teori intervensi pemerintah (Stiglitz, 2015) yang menyatakan bahwa kebijakan subsidi berfungsi untuk mengoreksi kegagalan pasar yang mengancam kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Sorong, pasar beras cenderung tidak efisien akibat faktor geografis dan biaya distribusi yang tinggi, sehingga intervensi pemerintah melalui subsidi menjadi sangat relevan.

Dari perspektif teori stabilisasi ekonomi (Keynes, 1936), program subsidi beras juga berperan dalam menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi pangan. Dengan menstabilkan harga bahan pokok, kebijakan ini turut menjaga keseimbangan ekonomi rumah tangga miskin di wilayah perkotaan. Selain itu, subsidi beras mendukung dua pilar utama teori ketahanan pangan FAO (2017), yaitu ketersediaan (*availability*) dan akses (*access*) terhadap pangan yang memadai.

Namun demikian, efektivitas kebijakan ini masih bergantung pada kualitas tata kelola dan transparansi pelaksanaan di daerah. Sejalan dengan temuan Sudaryo et al. (2018), keberhasilan kebijakan publik di tingkat lokal sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan dan koordinasi antarinstansi pelaksana. Dalam konteks Sorong, tantangan utama bukan hanya pada aspek kebijakan, tetapi juga pada keterbatasan logistik dan biaya distribusi yang tinggi.

Dengan demikian, meskipun secara umum subsidi beras telah mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga di Kota Sorong, peningkatan efektivitas masih diperlukan melalui penguatan sistem pendataan penerima manfaat, modernisasi infrastruktur distribusi, serta pengawasan terhadap kualitas beras yang disalurkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan program subsidi beras di Kota Sorong, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Program subsidi beras memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pasokan pangan di Kota Sorong.
Subsidi beras yang disalurkan melalui mekanisme *Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)* dan operasi pasar oleh Perum Bulog mampu menjaga ketersediaan stok beras dalam jumlah yang memadai. Cadangan beras pemerintah (CBP) di Kota Sorong cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 2–3 bulan, sehingga potensi kelangkaan dapat diminimalkan. Hal ini memperlihatkan fungsi subsidi beras sebagai *buffer stock* yang efektif dalam menjamin ketahanan pangan lokal.
2. Program subsidi beras juga berdampak positif terhadap stabilisasi harga pangan. Berdasarkan data lapangan dan observasi harga di pasar tradisional seperti Pasar Remu dan Pasar Boswesen, harga beras di Kota Sorong relatif stabil pada kisaran Rp11.000–Rp13.000 per kilogram selama periode 2022–2024. Ketika terjadi gejolak harga di tingkat nasional, kenaikan di Kota Sorong hanya berkisar 5–7 persen. Stabilitas ini tidak terlepas dari kebijakan operasi pasar dan penyaluran beras bersubsidi oleh pemerintah daerah bersama Bulog.
3. Efektivitas program masih dihadapkan pada sejumlah kendala struktural dan administratif. Tantangan utama yang ditemukan antara lain keterlambatan distribusi akibat kondisi transportasi dan cuaca, keterbatasan infrastruktur logistik, serta ketidaktepatan data penerima manfaat. Selain itu, kualitas beras yang bervariasi dan biaya distribusi tinggi menyebabkan subsidi tidak selalu memberikan efek merata di seluruh wilayah Kota Sorong, terutama di daerah pinggiran dan pulau-pulau terluar.
4. Secara teoretis, hasil penelitian ini mendukung teori intervensi pemerintah (Stiglitz, 2015) dan teori stabilisasi ekonomi (Keynes, 1936).
Program subsidi beras terbukti menjadi instrumen kebijakan publik yang efektif dalam menanggulangi kegagalan pasar dan menjaga kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan kata lain, subsidi beras di Kota Sorong berfungsi tidak hanya sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai mekanisme stabilisasi ekonomi daerah.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa program subsidi beras di Kota Sorong berpengaruh positif terhadap stabilisasi pasokan dan harga pangan, meskipun masih memerlukan perbaikan pada aspek pelaksanaan dan distribusi. Program ini berhasil mendukung terwujudnya ketahanan pangan daerah sekaligus mengurangi tekanan inflasi bahan pangan di tingkat lokal.

Referensi

- Edison, E., Anwar, Y., & Komariyah, I. (2016). *Manajemen sumber daya manusia: Strategi dan perubahan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Fahmi, I. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2017). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2017: Building Resilience for Peace and Food Security*. Rome: FAO.
- Hamali, A. Y. (2016). *Pemahaman Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CAPS.
- Hartatik, I. P. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Irwan, A., Anwar, V., & Zaitun, C. (2025). More than a paycheck: How non-financial incentives shape employee motivation in public administration. *Asian Management and Business Review*, 5(1), 178-195.

- Irwan, A., Mahfudnurnajamuddin, M., Nujum, S., & Mangkona, S. (2020). The effect of leadership style, work motivation and organizational culture on employee performance mediated by job satisfaction. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(8), 642-657.
- irwan, A., Budi, R., Zaitun, C., Asrianto, A., & Azizurrohman, M. (2025). Antecedents and effects of empowering leadership: A regional approach to disengagement and innovation.
- Irwan, A., Tiong, P., & Adi, Y. (2025). Agile Leadership, Digital Transformation, And Employee Performance: The Role Of Work Engagement. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS*, 4(2), 600-62.
- Kasmir. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. London: Macmillan.
- Mankiw, N. G. (2018). *Principles of Economics* (8th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Maslow, A. H. (dalam Sutrisno, E.). (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Mubarok, A. (2017). *Kepemimpinan dalam Organisasi Modern*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nurhayati, R. (2021). Analisis efektivitas kebijakan subsidi beras dalam menjaga stabilitas harga di Papua Barat. *Jurnal Kebijakan Publik dan Pembangunan Daerah*, 9(2), 45–57.
- Panggabean, M. S. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahmawati, T., & Yusuf, R. (2020). Implementasi program beras sejahtera (Rastra) di daerah terpencil. *Jurnal Sosiohumaniora*, 22(1), 15–28.
- Stiglitz, J. E. (2015). *Economics of the Public Sector* (4th ed.). New York: W.W. Norton & Company.
- Sudaryo, Y., Nugroho, M., & Rahayu, S. (2018). *Manajemen Kinerja dan Kompetensi SDM*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko. (2017). *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: BPFPE.
- Suryana, A. (2018). Peran subsidi pangan dalam stabilisasi harga beras nasional. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pangan*, 7(3), 112–128.
- Wibowo. (2016). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widodo, S. (2015). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.